BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Akuntabilitas tersebut menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja pada organisasi publik sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrayani, Diatmika, & Wahyuni, 2017). Sebagai organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas (Reyhan Hady Fauzan, 2017). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi tah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang dapat membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.

Tingkat akuntabilitas di Indonesia masih lemah sehingga perlu dilakukan suatu upaya perbaikan. Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, penerapan akuntabilitas yang optimal masih menghadapi tantangan, terutama di tingkat daerah, termasuk di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD bertugas mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi tahan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Peran DPRD meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah diantaranya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. DPRD berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah untuk memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, undang-undang, dan kebutuhan masyarakat. DPRD memiliki wewenang untuk membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan kepala daerah. Dalam hal ini DPRD memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan Masyarakat, mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan, korupsi, atau penyimpangan, dan juga mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks mendorong Akuntabilitas Kepala Daerah, DPRD memiliki hak untuk meminta keterangan atau klarifikasi dari kepala daerah mengenai kebijakan tertentu. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, DPRD dapat memberikan rekomendasi tindakan hukum atau menyampaikan mosi tidak percaya. Prinsipnya, peran DPRD dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran secara efektif, DPRD dapat memastikan bahwa pemerintah daerah melayani kepentingan masyarakat dengan optimal. Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan

kat merupakan kunci utama untuk mewujudkan tata kelola

tahan yang akuntabel.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Untuk itu perlu diidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa faktor diyakini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, salah satunya adalah alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang tepat adalah dasar bagi pelaksanaan program yang efektif, sebab distribusi dana yang efisien dapat memastikan bahwa setiap kegiatan atau program pemerintah mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan awal. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. anggaran bukanlah proses yang berdiri sendiri, dikeluarkan dari saluran lain dari tindakan pemerintah. penganggaran yang baik didukung oleh, dan pada gilirannya mendukung, berbagai pilar pemerintahan modern, yang menuntut adanya integritas, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dan pendekatan strategis untuk perencanaan dan mencapai tujuan nasional.

Waworuntu dan Runtu, (2014) Perubahan sistem penganggaran di Indonesia ke sistem penganggaran yang berbasis kinerja merupakan faktor penting untuk mendorong dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah lam mendukung terselenggaranya *Good Governance* yang an prasyarat utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dalam banyak kasus, kurang optimalnya alokasi anggaran mengakibatkan program-program pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terhenti di tengah jalan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain alokasi anggaran, kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga memegang peranan penting. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam menentukan kinerja pemerintah, khususnya dalam lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Dalam konteks Good Governance Framework, Kompetensi SDM merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kompetensi yang memadai, pemerintah daerah dapat memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas yang baik berperan dalam memastikan anggaran dialokasikan dan dikelola secara efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran program pemerintah. Untuk itu perlu didukung oleh SDM yang kompeten, sehingga diharapkan berbagai

n dan program pemerintah yang ada dapat direalisasikan secara

el, efisien, dan sesuai standar.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Selanjutnya, sistem pengendalian internal yang efektif menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menciptakan akuntabilitas. Sistem pengendalian internal yang baik membantu mencegah kesalahan dan mendeteksi penyimpangan dalam proses pelaksanaan program serta penggunaan anggaran. Dalam konteks DPRD, keberadaan pengendalian internal yang kuat berfungsi sebagai kontrol atas kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga setiap program dan alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan transparan.

Pada prinsipnya kajian mengenai akuntabilitas pemerintah membantu mengidentifikasi bagaimana transparansi dan kontrol internal dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan sistem akuntabilitas yang kuat, setiap pengeluaran dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Implikasinya adalah meningkatkan transparansi memperkecil peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga anggaran pemerintah digunakan sesuai peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketika pemerintah menunjukkan akuntabilitas yang tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah cenderung meningkat. Penelitian akuntabilitas membantu mengidentifikasi bagaimana pemerintah memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kepada publik. Hal tersebut berimplikasi pada kepercayaan public sebagai fondasi penting menjalankan pemerintahan yang stabil. Dengan meningkatnya yaan, masyarakat akan lebih mendukung kebijakan pemerintah,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang pada gilirannya akan mempermudah pelaksanaan program-program pemerintah.

Sari & Wijaya (2018) dalam penelitiannya tentang *Pengaruh Alokasi Anggaran dan Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia,* menyimpulkan bahwa alokasi anggaran yang efektif dan kompetensi SDM yang memadai berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah di sektor layanan public. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran serta pengembangan SDM yang kompeten, guna mengoptimalkan fungsi pelayanan public.

Akuntabilitas pemerintah membantu memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk kepatuhan dalam pengelolaan keuangan, pelaporan kinerja, dan penyusunan kebijakan. Dengan kepatuhan yang baik, pemerintah dapat meminimalkan risiko tuntutan hukum atau sanksi akibat pelanggaran regulasi. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam konteks DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dengan asumsi bahwa Provinsi Sulawesi Barat menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan anggaran, termasuk alokasi yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan dan si penggunaan dana. DPRD memiliki peran strategis dalam kan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Sulawesi Barat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses informasi publik terkait kinerja dan penggunaan anggaran. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Santoso & Pramono (2019) dalam penelitiannya tentang *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah di Jawa Timur focus pada* menyelidiki peran sistem pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas dan kinerja organisasi pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat mampu meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi.

Sari dan Wijaya (2018) menekankan bahwa "Kinerja DPRD ditentukan oleh seberapa efektif mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta kemampuannya dalam mewakili kepentingan masyarakat". Hal Ini menunjukkan bahwa DPRD harus mampu menjalankan perannya secara optimal untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang baik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Rendahnya akuntabilitas menghambat pembangunan dan pelayanan publik, serta berisiko

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menurunkan kepercayaan masyarakat. Berbagai tantangan yang seringkali di hadapi DPRD di Sulawesi Barat diantaranya:

1. Kurangnya Kapasitas Anggota DPRD

   Beberapa anggota DPRD mungkin menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan pengawasan yang efektif.

2. Intervensi Politik

   Kepentingan politik tertentu dapat menghambat independensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

3. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

   Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan membuat DPRD sulit memperoleh masukan yang representatif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah di Sulawesi Barat, meningkatkan peran strategis DPRD dalam pengawasan dan legislasi, dan menyediakan rekomendasi berbasis data untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks manajemen keuangan daerah, urgensi penelitian ini antara lain untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran untuk program prioritas. memperkuat kompetensi SDM dalam mengelola keuangan daerah, mengoptimalkan pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan anggaran, serta memberikan rekomendasi strategis untuk ung tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan an. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi DPRD dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Alokasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Apakah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori di bidang akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan menambah pemahaman mengenai pengaruh alokasi anggaran, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Temuan penelitian ini akan memperkuat teori-teori yang ada serta memberikan bukti empiris yang relevan dengan kondisi pemerintahan daerah di Indonesia.
2. Secara teoritis, penelitian ini akan memperjelas hubungan antara alokasi anggaran, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini penting karena variabel-variabel ini sering kali dianggap berpengaruh pada kinerja pemerintahan, namun jarang dijelaskan secara detail dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pemerintah.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam pengaruh faktor-faktor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, baik di DPRD atau lembaga lainnya. Penelitian ini juga membuka ıang untuk studi yang lebih spesifik mengenai pengelolaan SDM ɐn pengendalian internal di sektor pemerintahan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan praktis bagi DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola anggaran, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperkuat sistem pengendalian internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah.
2. Dengan adanya alokasi anggaran yang tepat, SDM yang kompeten, dan pengendalian internal yang baik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan anggaran, kompetensi SDM, dan pengendalian internal. Pemerintah daerah lain dapat menerapkan langkah-langkah atau kebijakan serupa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di wilayah mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

k memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari n ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

asil Penelitian,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Mendeskripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis stratistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran dan hasil dari kinerja program yang dijalankan. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik dan memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan perencanaan dan standar yang ditetapkan. Konsep ini terkait erat dengan tata kelola yang baik, di mana kinerja yang akuntabel ditunjang oleh penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan bahwa "kompetensi individu dalam organisasi pemerintahan merupakan kunci untuk mencapai akuntabilitas yang lebih baik". Hal ini menggarisbawahi bahwa sumber daya manusia yang kompeten berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja ɘmerintah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa "Kinerja pemerintah dan DPRD sangat bergantung pada sistem pengukuran yang jelas dan transparan, yang mencakup semua aspek dari proses pengambilan keputusan hingga hasil akhir yang dicapai". Ini menunjukkan pentingnya adanya mekanisme penilaian yang objektif untuk meningkatkan kinerja.

Riyanto (2015) menjelaskan bahwa "DPRD sebagai representasi rakyat harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan agar dapat mendukung kinerja pemerintah yang efektif". Hal ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD tidak terlepas dari kemampuannya dalam berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat.

Kinerja pemerintah dan DPRD adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran yang tepat dan indikator yang jelas, baik pemerintah maupun DPRD dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.1.1.1. Akuntabilitas dalam Konteks Manajemen Keuangan Daerah

Dalam manajemen keuangan daerah, akuntabilitas kinerja mencakup:

1. **Perencanaan Anggaran**

   Penyusunan rencana anggaran yang berorientasi pada hasil (*performance-based budgeting*), sesuai prioritas pembangunan daerah.

2. **Pengelolaan Keuangan**

   Implementasi alokasi dan realisasi anggaran secara efektif dan efisien, berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

3. **Pelaporan dan Evaluasi**

   Penyampaian laporan keuangan dan kinerja secara berkala sesuai standar yang ditetapkan, seperti laporan pertanggungjawaban APBD.

2.1.1.2. Relevansi Akuntabilitas Kinerja di DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam:

- **Penganggaran**

  Mengawasi penyusunan dan alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan memprioritaskan program yang berkontribusi terhadap pembangunan.

- **Pengawasan**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan memastikan tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan.

- **Pertanggungjawaban**

  Menuntut transparansi dari eksekutif dalam pelaporan realisasi anggaran dan pencapaian kinerja.

Namun, akuntabilitas di DPRD tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup komitmen para anggotanya untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

2.1.1.3 Pentingnya Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Manajemen Keuangan Daerah

Akuntabilitas kinerja di DPRD Provinsi Sulawesi Barat berperan strategis untuk:

- **Meningkatkan Kepercayaan Publik**

  Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan hasil kinerja yang nyata.

- **Efektivitas Program Pembangunan**

  Memastikan bahwa alokasi anggaran membawa dampak positif pada masyarakat.

- **Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah**

  Sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*.

demikian, konsep akuntabilitas kinerja pemerintah yang diterapkan
) Sulawesi Barat menjadi instrumen utama dalam mendorong

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas, berdaya guna, dan berhasil guna.

Adapun Indikator-indikator akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. **Transparansi**
    - Ketersediaan informasi publik mengenai anggaran dan laporan keuangan.
    - Adanya mekanisme yang memudahkan akses masyarakat terhadap informasi.
2. **Keterlibatan Publik**
    - Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
    - Tingkat umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.
3. **Kepatuhan terhadap Regulasi**
    - Tingkat pelaksanaan regulasi dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.
    - Jumlah pelanggaran yang dilaporkan dan penegakan sanksi.
4. **Efektivitas Penggunaan Anggaran**
    - Realisasi anggaran yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

- Evaluasi dampak program yang dibiayai oleh anggaran terhadap masyarakat.

5. **Kualitas Laporan Keuangan**
    - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
    - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. **Akuntabilitas Internal**
    - Keberadaan dan efektivitas sistem pengendalian internal dalam lembaga pemerintahan.
    - Hasil audit internal yang menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang ditetapkan.
7. **Pengukuran Kinerja**
    - Penggunaan indikator kinerja utama (IKU) untuk menilai pencapaian target.
    - Frekuensi evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah.

Konsep akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui indikator-indikator yang jelas dan terukur, pemerintah dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil kinerja mereka kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi, keterlibatan publik, dan sistem pengendalian internal yang baik, akuntabilitas kinerja dapat tercapai, a meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.2 Teori Alokasi Anggaran

Menurut Sasongko dan Parulian (2015:2) berpendapat bahwa anggaran adalah suatu kegiatan yang disusun secara sistematis oleh manajemen selama satu periode terutang secara kuantitatif Menurut Rachmat (2011:147) menyatakan bahwa “anggaran (budget) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun”.

Konsep alokasi anggaran sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Melalui proses alokasi yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempertahankan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, alokasi anggaran berperan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori penganggaran publik menyatakan bahwa alokasi anggaran yang tepat merupakan salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah yang efektif dan efisien (Jones & Pendlebury, 2000). Dalam konteks akuntabilitas, anggaran yang dialokasikan dengan benar harus mencerminkan kebutuhan yang ada dan harus dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai ık mengimplementasikan kebijakan publik, anggaran tidak hanya ninkan prioritas pemerintah tetapi juga menjadi instrumen yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menunjukkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dalam studi ini, alokasi anggaran dinilai sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja, karena kinerja pemerintah daerah bergantung pada ketepatan dan efektivitas dalam mendistribusikan anggaran untuk berbagai program yang direncanakan.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa "Alokasi anggaran merupakan refleksi dari kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, dan hal ini harus disusun dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta efektivitas penggunaan sumber daya".

Sukirno (2010) mengemukakan bahwa "Alokasi anggaran yang efektif harus memperhatikan aspek keadilan, efisiensi, dan dampak sosial dari pengeluaran publik, sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal".

a) Tujuan Alokasi Anggaran

1. **Mencapai Tujuan dan Sasaran**

   Alokasi anggaran bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah.

2. **Efisiensi dan Efektivitas**

   Proses alokasi bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, sehingga hasil yang dicapai ebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

eadilan dan Kesejahteraan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Alokasi anggaran juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan program-program sosial dan pembangunan infrastruktur.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas**

   Proses alokasi anggaran yang baik harus melibatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan.

b) Proses Alokasi Anggaran

1. **Perencanaan Anggaran**

   Pemerintah atau organisasi merencanakan kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang ingin dicapai.

2. **Penganggaran**

   Proses ini melibatkan penyusunan dokumen anggaran yang akan diajukan untuk persetujuan oleh lembaga legislatif (seperti DPRD di tingkat daerah).

3. **Pelaksanaan Anggaran**

   Setelah disetujui, anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk pengeluaran untuk berbagai program.

4. **Evaluasi dan Pertanggungjawaban**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Setelah pelaksanaan, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan anggaran tercapai, dan laporan pertanggungjawaban disusun untuk menunjukkan penggunaan dana.

c) Jenis Alokasi Anggaran

- **Alokasi Discretionary**

  Dana yang dialokasikan berdasarkan keputusan manajerial untuk program-program yang dianggap prioritas.

- **Alokasi Mandatori**

  Dana yang dialokasikan berdasarkan hukum atau peraturan yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan anggaran untuk program tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan.

2.1.3 Kompetensi SDM

Kompetensi SDM mengacu pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki individu dalam menjalankan tugas-tugas tertentu (Spencer & Spencer, 1993). Kompetensi ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Menurut teori kompetensi, organisasi yang memiliki SDM berkualitas cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik karena didukung oleh kemampuan individu dalam mengelola dan menjalankan program dengan efektif. Kompetensi SDM di lingkungan DPRD sangat berpengaruh dalam

ıkan keberhasilan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi

n. SDM yang kompeten mampu mengelola tanggung jawab mereka

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sesuai standar yang ditetapkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Konsep kompetensi SDM sangat penting dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam sektor publik. Dengan memahami dan mengembangkan kompetensi SDM, organisasi dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan SDM yang baik berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Menurut Sulistyowati (2021) SDM merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah instansi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Ulrich dan Brockbank (2005) menyatakan bahwa "Kompetensi SDM adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam peran tertentu". Ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kemampuan praktis dan sikap.

Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan bahwa "Kompetensi mencakup pola perilaku yang dapat diamati dan terukur, yang berkontribusi pada keberhasilan individu dalam pekerjaan mereka". Ini menekankan pentingnya perilaku sebagai bagian dari kompetensi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a) Elemen Kompetensi SDM

1. **Pengetahuan (*Knowledge*)**:

   Mengacu pada informasi dan pemahaman yang dimiliki individu tentang suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja.

2. **Keterampilan (*Skills*)**:

   Merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam praktik. Keterampilan ini bisa berupa keterampilan teknis (misalnya, penggunaan perangkat lunak atau alat) atau keterampilan interpersonal (misalnya, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim).

3. **Sikap (*Attitude*)**:

   Menunjukkan predisposisi individu untuk bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kerja. Sikap yang positif, seperti motivasi dan komitmen, dapat meningkatkan kinerja SDM.

4. **Perilaku (*Behavior*)**:

   Merupakan cara individu bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Perilaku yang profesional dan etis sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

b) Pentingnya Kompetensi SDM

eningkatan Kinerja

SDM yang kompeten dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

- **Inovasi dan Adaptasi**:

  SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi organisasi.

- **Pengembangan Organisasi**

  Kompetensi SDM yang baik mendukung pengembangan budaya organisasi yang positif, yang penting untuk menarik dan mempertahankan talenta.

- **Akuntabilitas**

  Dalam konteks sektor publik, kompetensi SDM yang tinggi memastikan bahwa pegawai pemerintah dapat bertanggung jawab atas kinerja mereka dan melayani masyarakat dengan baik.

c) Indikator Kompetensi SDM

Indikator kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu atau kelompok dalam suatu organisasi memenuhi kriteria kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Menurut Wiguna (2017) indikator kompetensi sumber daya manusia

engembangan diri.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kemampuan untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, terutama perilaku dan kemampuan mengembangkan diri.

2. Profesional.

   Kemampuan dalam memahami setiap pekerjaan yang diberikan dan siap melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki.

3. Penguasaan teknologi.

   Kemampuan dalam mengusai teknologi dalam proses pekerjaan.

4. Jenjang pendidikan.

   Kemampuan untuk memiliki pengetahuan atau latar belakang pendidikan yang sesuai dalam melaksanakan bidang pekerjaan.

5. Keahlian.

   Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara detail dan juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai secara efisien, efektif, dan patuh pada peraturan yang berlaku (COSO, 2013). Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission),* pengendalian internal meliputi pengawasan, ıuan, penilaian risiko, dan aktivitas kontrol yang diperlukan untuk ai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemerintah, pengendalian internal membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang dapat memengaruhi kinerja. Sistem ini juga memainkan peran penting dalam menciptakan transparansi, terutama dalam penggunaan anggaran. Sistem pengendalian internal yang kuat diharapkan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan menjaga agar setiap program dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan standar, regulasi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

a) Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efesien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2016:163) tujuan sistem pengendalian internal adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi.

   Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memilikiwujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

   Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang akan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efesiensi.

   Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efesien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

   Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan danprosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaam lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

b) Komponen Pengendalian Intern

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menurut Hery (2013), pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan. Kelima komponen pengendalian intern tersebut yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

   Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) adalah suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian sikap orangnya. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang bersifat disiplin dan terstruktur.

2. Penilaian Resiko

   Penilaian Resiko (*Risk Assessment*) adalah suatu kebijakan dan prosedur yang bisa membantu perusahaan dalam meyakinkan tugas dan perintah yang diberikan manajemen telah dijalankan.

3. Aktivitas Pengendalian

   Aktivitas Pengendalian (*Control Activities)* adalah suatu kebijakan dan prosedur yang membantu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan manajemen telah dilaksanakan.

4. Informasi dan Komunikasi

   Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Pengawasan / Pemantauan (Monitoring)

adalah suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada waktu tertentu. Pemantauan ini melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan.

c) Unsur-unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur sistem pengendalian intern suatu pengendalian intern yang baik perlu adanya unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan pengendalian, sehingga tujuan dari pengendalian intern dapat tercapai. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi menurut Mulyadi (2016:164) antara lain :

1. Struktur organisasi

   Struktur organisasi merupakan kerangka pemisahan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatankegiatan pokok perusahaan. Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dilakukan untuk membagi berbagai tahapan transaksi kepada unit organisasi yang lain sehingga semua tahapan transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. Struktur organisasi yang dapat memisahkan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah kecurangan-kecurangan dalam

   sahaan.

   m otorisasi dan prosedur pencatatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam suatu perusahaan merupakan suatu alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi yang terjadi.

3. Praktik yang sehat

   Setiap pegawai di dalam suatu perusahaan melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, jika penyusunan struktur organisasi dan perancangan arus prosedur sudah merupakan suatu rencana yang strategis maka diperlukan adanya praktik-praktik yang sehat yang merupakan alat taktis untuk tercapainya suatu rencana.

4. Karyawan yang cakap

   Karyawan yang cakap merupakan salah satu unsur sistem pengendalian intern yang paling penting bagi perusahaan karena keberhasilan perusahaan secara keseluruhan tergantung pada prestasi dan sikap karyawan. Untuk itu, penyeleksian terhadap karayawan harus benar-benar dilaksanakan supaya mendapatkan karyawan yang berkualitas dan bisa berprestasi, yaitu melalui prosedur pengujian yang ketat, pengukuran prestasi atas tanggung jawab yang diberikan serta pendidikan dan pelatihan.

d) Indikator Pengendalian Internal

Indikator Pengendalian Internal menurut Mahmudi (2016:21) adalah:

1. Lingkungan pengendalian

   ungan Pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang di landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan.

2. Penaksiran risiko

Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.

4. Informasi dan komunikasi

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus 10 memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian

al lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi

jaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal

COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

5. Pemantauan

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

2.2. Tinjauan Empiris

Penelitian oleh Susanto (2018), *Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah* Kota Surabaya, Jawa Timur. Menemukan Kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal memiliki h signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Ditemukan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bahwa akuntabilitas meningkat ketika kompetensi aparatur dipadukan dengan pengendalian internal yang baik.

Penelitian oleh Handayani dan Nugraha (2020), *Pengaruh Alokasi Anggaran dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di* Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyimpulkan Alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan dan pengendalian internal yang efektif meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi SDM menjadi faktor pendukung untuk implementasi pengendalian internal yang optimal.

Penelitian oleh Setyawan et al. (2021), *Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di* Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Kompetensi SDM berperan penting dalam memaksimalkan kinerja pengelolaan anggaran. Sistem pengendalian internal juga memiliki dampak positif terhadap pelaporan akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian oleh Wahyuni dan Wijaya (2019), *Pengaruh Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah,* Kota Denpasar, Bali. Transparansi keuangan sangat didukung oleh kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal yang kuat. Kedua variabel ini juga memperbaiki litas pengelolaan keuangan daerah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian oleh Purwanto (2020), *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Alokasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sektor Publik,* Lokasi penelitian di Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal yang efektif meningkatkan akuntabilitas kinerja sektor publik, terutama dalam penggunaan anggaran daerah. Kompetensi SDM mendukung pelaksanaan pengendalian secara optimal.

Penelitian oleh Fitriani et al. (2021), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah* Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Kompetensi SDM, alokasi anggaran yang tepat, dan sistem pengendalian internal yang memadai secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian oleh Hermanto dan Arifin (2022), *Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten* Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini menemukan bahwa Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi SDM yang profesional dan pengendalian internal yang berjalan sesuai standar. Alokasi anggaran yang direncanakan dengan matang mendukung keberhasilan kinerja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
n ini Fokus pada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, memberikan
yang lebih spesifik pada pengelolaan dan kinerja legislatif di

Optimized using
trial version
www.balesio.com

provinsi tersebut.menyediakan analisis terintegrasi dari alokasi anggaran, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja, memberikan pandangan holistik yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang unik dengan memperdalam analisis dalam konteks DPRD Provinsi Sulawesi Barat, menggunakan data terbaru, dan juga mengembangkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Optimized using
trial version
www.balesio.com